

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Zakat menjadi salah satu rukun islam yang harus ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu diwajibkan mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada fakir miskin atau mereka yang berhak, dengan syarat-syarat yang ditentukan sesuai ajaran agama islam. Secara umum, zakat dapat dirumuskan sebagai bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat kepada orang-orang tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Syarat itu adalah nisbah (jumlah minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, Haul 9 jangka waktu yang ditentukan bila seseorang wajib mengeluarkan zakat) harta, dan kadarnya (ukuran zakat yang harus dikeluarkan) (Ridwan dkk., 2020).

Zakat merupakan instrumen keuangan islam yang memiliki potensi sangat besar dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi, seperti masalah kemiskinan. Masyarakat dibawah garis kemiskinan dibantu untuk menjadi muzaki atau pembayar zakat yang artinya telah mencapai di atas garis kemiskinan. Upaya mewujudkan realisasi potensi zakat tersebut membutuhkan dukungan terhadap optimalisasi pengelolaan zakat yang baik. Jika dilihat Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah umat muslim terbesar di dunia harus memiliki peran aktif dalam perwujudan kesejahteraan masyarakat dengan pengoptimalan potensi zakat. Potensi ini tentu saja di anggap jelas mampu mewujudkan pengetasan kemiskinan tetapi melalui pengelolaan dan mekanisme yang tepat dan mempuyai hasil yang baik (Saputra & Pailis, 2025).

Meski demikian, sebagian umat Islam masih memaknai zakat sekadar sebagai kewajiban personal kepada Allah, bukan sebagai bentuk nyata solidaritas sosial yang fundamental. Dalam praktiknya, zakat kerap ditunaikan hanya demi menggugurkan kewajiban syariat, tanpa memperhatikan aspek pemerataan kekayaan secara adil. Kondisi ini menyebabkan potensi dana zakat yang sesungguhnya besar tidak dapat dihimpun dan dikelola secara maksimal, sehingga berbagai program strategis seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat belum dapat terlaksana secara optimal (Ali dkk., 2016).

Pengelolaan zakat memerlukan kehadiran lembaga yang dapat menjalankan beragam fungsi mulai dari penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, sampai pengawasan sehingga zakat dapat tersalurkan secara efektif kepada mereka yang berhak menerimanya. Di samping itu, keberhasilan penyaluran dana zakat juga tidak lepas dari sinergi serta keterlibatan aktif masyarakat, yang meliputi fungsi motivasi, pembinaan, pengumpulan, perencanaan, pendistribusian yang dijalankan secara baik dan terorganisir.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, pemerintah mendirikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi pemerintah yang berwenang tunggal dalam menghimpun serta menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di tingkat nasional. Pendirian lembaga ini merujuk pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Adapun di Kabupaten Indramayu, fungsi penghimpunan dan penyaluran dana zakat diemban oleh BAZNAS Kabupaten Indramayu (Sumantri, 2018).

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indramayu berupaya mengoptimalkan pelayanannya kepada masyarakat kurang mampu melalui berbagai inovasi dan program yang diarahkan untuk mencapai hasil yang maksimal, seperti pelatihan bagi pegawai, penyaluran zakat baik yang bersifat konsumtif maupun produktif, serta peluncuran zatmart sebagai upaya pemberdayaan mustahik. Selain itu, BAZNAS turut meningkatkan efektivitas dan transparansi melalui digitalisasi kantor serta pengelolaan media sosial, di samping memperluas jangkauan penghimpunan zakat melalui kerja sama dengan berbagai pihak. Meski demikian, BAZNAS masih dihadapkan pada tantangan internal berupa keterbatasan sumber daya manusia (SDM), serta tantangan eksternal berupa pola pikir masyarakat yang masih cenderung konsumtif (Mubarokah dkk., 2018).

Tabel 1. 1 Laporan Realisasi Pendistribusian ZIS Tahun 2025 BAZNAS Kabupaten Indramayu

NO	Nama Program	Jumlah Penyaluran
1.	Bidang Kemanusiaan/Indramayu Adil	3.959.490.872,50
2.	Bidang Kesehatan/Indramayu Maju	190.878.000,00
3.	Bidang Pendidikan/Indramayu Hebat	2.533.432.500,00
4.	Bidang Ekonomi/Indramayu Makmur	68.000.000,00
5.	Bidang Dakwah/Indramayu Religius	2.077.203.281,02
Jumlah		8.829.004.653,52

Berdasarkan Laporan realisasi pendistribusian dana ZIS BAZNAS Kabupaten Indramayu pada tahun 2025 mencapai Rp9.808.000.000. Dana tersebut disalurkan melalui lima bidang program, yaitu bidang kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan dakwah. Penyaluran dana tersebut bertujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membantu mustahik sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Bidang Kemanusiaan (Indramayu Adil) menjadi program dengan alokasi dana terbesar, yaitu Rp3.450.902.000 atau sekitar 35,19% dari total penyaluran. Besarnya alokasi ini menunjukkan bahwa BAZNAS masih memprioritaskan bantuan sosial, bantuan bencana, santunan fakir miskin, serta program kemanusiaan lainnya. Selanjutnya, Bidang Dakwah (Indramayu Religius) memperoleh alokasi sebesar Rp2.890.648.000 atau sekitar 29,47%, sedangkan Bidang Pendidikan (Indramayu Hebat) menerima dana sebesar Rp2.835.700.000 atau sekitar 28,91%. Hal ini menunjukkan komitmen BAZNAS dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan masyarakat melalui program beasiswa, bantuan pendidikan, serta pembinaan keagamaan.

Pada Bidang Kesehatan (Indramayu Maju), dana yang disalurkan mencapai Rp510.250.000 atau sekitar 5,20% dari total penyaluran. Dana tersebut digunakan untuk membantu biaya pengobatan, layanan kesehatan, serta program promotif dan preventif bagi masyarakat kurang mampu Sementara itu, Bidang Ekonomi (Indramayu Makmur) memperoleh alokasi sebesar Rp120.500.000 atau sekitar 1,23%. Meskipun menjadi bidang dengan alokasi terkecil, program ini tetap berperan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik melalui bantuan modal usaha dan pemberdayaan ekonomi produktif.

Secara keseluruhan, realisasi pendistribusian dana ZIS pada tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun 2024, dari Rp8.807.817.096 menjadi Rp9.808.000.000, atau meningkat sekitar 11,36%. Peningkatan tersebut

mencerminkan semakin optimalnya penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Indramayu dalam mendukung kesejahteraan masyarakat (Ayulyn Nisail Musyarofah dkk., 2023).

Kabupaten Indramayu merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Barat yang pusat pemerintahannya berada di Kecamatan Indramayu. Daerah ini masih menghadapi tantangan kemiskinan yang cukup berat hingga saat ini. Secara geografis, Indramayu berbatasan langsung dengan Laut Jawa di bagian utara, Kabupaten Cirebon di bagian tenggara, Kabupaten Majalengka serta Kabupaten Sumedang di bagian selatan, dan Kabupaten Subang di bagian barat. Dari segi administrasi, daerah ini terdiri atas 31 kecamatan yang meliputi 313 desa dan kelurahan.

Meskipun tergolong kaya akan sumber daya alam, khususnya di bidang pertanian dan perikanan, Indramayu masih dihadapkan pada persoalan ketimpangan distribusi kekayaan serta keterbatasan infrastruktur. Kondisi ini berdampak pada terhambatnya laju pertumbuhan ekonomi sekaligus terbatasnya kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. Di samping itu, rendahnya kualitas pendidikan dan kurangnya keterampilan yang dimiliki penduduk turut memperburuk situasi kemiskinan yang dialami wilayah ini (Rizkiyah, t.t.).

Tabel 1. 2 Indeks Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020-2021

Peringkat	Kabupaten/Kota	Indeks 2020	Kabupaten/Kota	Indeks 2021
1	Kota Tasikmalaya	12,97	Kota Tasikmalaya	13,13
2	Kuningan	12,82	Kuningan	13,10

3	Indramayu	12,70	Indramayu	13,04
4	Majalengka	11,43	Majalengka	12,33
5	Cirebon	11,24	Cirebon	12,30
6	Bandung Barat	10,49	Bandung Barat	11,30
7	Cianjur	10,36	Cianjur	11,18
8	Tasikmalaya	10,34	Tasikmalaya	11,15
9	Sumedang	10,26	Sumedang	10,71
10	Garut	9,98	Garut	10,65
11	Kota Cirebon	9,52	Subang	10,03
12	Subang	9,31	Kota Cirebon	10,03
13	Pengandaran	8,99	Pengandaran	9,65
14	Purakarta	8,27	Karawang	8,95
15	Karawang	8,26	Purwakarta	8,83
16	Kota Sukabumi	7,70	Kota Sukabumi	8,25
17	Bogor	7,69	Bogor	8,13
18	Ciamis	7,62	Ciamis	7,97
19	Sukabumi	7,09	Sukabumi	7,70
20	Bandung	6,91	Kota Bogor	7,24
21	Kota Bogor	6,68	Bandung	7,15
22	Kota Banjar	6,09	Kota Banjar	7,11
23	Kota Cimahi	5,11	Kota Cimahi	5,35
24	Bekasi	4,82	Bekasi	521

25	Kota Bekasi	4,38	Kota Bekasi	4,74
26	Kota Bandung	3,99	Kota Bandung	4,73
27	Kota Depok	2,45	Kota Depok	2,58

(kemiskinan-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-barat-2020-2025, t.t.)

Tabel 1. 3 Indeks Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2022-2023

Peringkat	Kabupaten/Kota	Indeks 2022	Kabupaten/Kota	Indeks 2023
1	Indramayu	12,77	Indramayu	12,13
2	Kuningan	12,76	Kuningan	12,12
3	Kota Tasikmalaya	12,72	Kota Tasikmalaya	11,53
4	Cirebon	12,01	Majalengka	11,21
5	Majalengka	11,94	Cirebon	11,20
6	Bandung Barat	10,82	Bandung Barat	10,52
7	Tasikmalaya	10,73	Tasikmalaya	10,28
8	Cianjur	10,55	Cianjur	10,22
9	Garut	10,42	Garut	9,77
10	Sumedang	10,14	Subang	9,52
11	Kota Cirebon	9,82	Sumedang	9,36
12	Subang	9,75	Kota Cirebon	9,16
13	Panganaran	9,32	Pengandaran	8,98
14	Purwakarta	8,70	Purwakarta	8,46
15	Karawang	8,44	Karawang	7,87
16	Kota Sukabumi	8,02	Kota Sukabumi	7,50

17	Bogor	7,73	Ciamis	7,42
18	Ciamis	7,72	Bogor	7,27
19	Sukabumi	7,34	Sukabumi	7,01
20	Kota Bogor	7,10	Kota Bogor	6,67
21	Bandung	6,80	Bandung	6,40
22	Kota Banjar	6,73	Kota Banjar	6,14
23	Kota Cimahi	5,11	Bekasi	4,93
24	Bekasi	5,01	Kota Cimahi	4,66
25	Kota Bekasi	4,43	Kota Bekasi	4,10
26	Kota Bandung	4,25	Kota Bandung	3,96
27	Kota Depok	2,53	Kota Depok	2,38

(kemiskinan-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-barat-2020-2025, t.t.)

Tabel 1. 4 Indeks Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2024-2025

Peringkat	Kabupaten/Kota	Indeks 2024	Kabupaten/Kota	Indeks 2025
1	Indramayu	11,93	Indramayu	11,02
2	Kuningan	11,88	Kota Tasikmalaya	10,84
3	Kota Tasikmalaya	11,10	Kuningan	10,74
4	Cirebon	11,00	Majalengka	10,31
5	Majalengka	10,82	Cirebon	10,23
6	Bandung Barat	10,49	Tasikmalaya	10,15
7	Tasikmalaya	10,23	Bandung Barat	9,87
8	Cianjur	10,14	Cianjur	9,82

9	Garut	9,68	Garut	9,39
10	Subang	9,49	Subang	9,23
11	Sumedang	9,10	Sumedang	8,81
12	Kota Cirebon	9,02	Kota Cirebon	8,66
13	Pengandaran	8,75	Pengandaran	8,03
14	Purwakarta	8,41	Purwakarta	7,87
15	Karawang	7,86	Ciamis	7,19
16	Ciamis	7,39	Karawang	7,08
17	Kota Sukabumi	7,20	Kota Sukabumi	6,90
18	Bogor	7,05	Sukabumi	6,41
19	Sukabumi	6,87	Bogor	6,26
20	Kota Bogor	6,53	Bandung	6,04
21	Bandung	6,19	Kota Bogor	5,89
22	Kota Banjar	5,86	Kota Banjar	5,73
23	Bekasi	4,80	Bekasi	4,36
24	Kota Cimahi	4,39	Kota Cimahi	4,20
25	Kota Bekasi	4,01	Kota Bekasi	3,96
26	Kota Bandung	3,87	Kota Bandung	3,78
27	Kota Depok	2,34	Kota Depok	2,31

(kemiskinan-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-barat-2020-2025, t.t.)

menyajikan peringkat 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat berdasarkan persentase penduduk miskin dari yang tertinggi hingga terendah selama periode 2020–2025. Menjadi dasar untuk menempatkan posisi Kabupaten

Indramayu, yang menjadi fokus penelitian ini, dalam konteks kemiskinan regional Jawa Barat secara keseluruhan.

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa Kabupaten Indramayu bukan merupakan wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi sejak awal periode pengamatan. Pada tahun 2020 dan 2021, posisi termiskin di Jawa Barat justru ditempati oleh Kota Tasikmalaya, dengan Kabupaten Indramayu berada di peringkat ketiga (12,70 persen dan 13,04 persen). Namun sejak tahun 2022, Kabupaten Indramayu mengalami pergeseran signifikan dengan menempati peringkat pertama sebagai kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Provinsi Jawa Barat, dan kondisi ini bertahan secara konsisten hingga tahun 2025.

Meskipun secara persentase tingkat kemiskinan Kabupaten Indramayu menunjukkan tren penurunan dari 12,77 persen (2022) menjadi 11,02 persen (2025) sejalan dengan tren penurunan kemiskinan Provinsi Jawa Barat secara umum penurunan tersebut belum cukup untuk menggeser posisi Indramayu dari peringkat pertama. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun terjadi perbaikan kondisi kesejahteraan secara nominal, laju penurunan kemiskinan di Kabupaten Indramayu relatif tidak lebih cepat dibandingkan kabupaten/kota lain di Jawa Barat, sehingga kesenjangannya terhadap daerah lain tidak banyak berubah.

Konsistensi Kabupaten Indramayu sebagai wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi selama empat tahun berturut-turut (2022–2025) ini menjadi salah satu justifikasi empiri, karena mengindikasikan adanya persoalan kemiskinan

yang bersifat struktural dan menetap (persistent poverty), bukan sekadar fluktuasi kondisi ekonomi jangka pendek.

Tabel 1. 5 Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Indramayu Tahun 2012 – 2025

Tahun	Garis kemiskinan (rupiah/kapital/bulan)	Jumlah penduduk miskin (ribu)	Presentase penduduk miskin
2012	325.787	257,30	15,44
2013	350.455	251,10	14,99
2014	364.360	240,70	14,29
2015	379.088	253,12	14,98
2016	397.196	237,00	13,95
2017	413.857	233,38	13,67
2018	447.378	204,18	11,89
2019	458.240	191,76	11,11
2020	474.807	220,31	12,70
2021	481.754	228,60	13,04
2022	499.805	225,04	12,77
2023	532.545	214,74	12,13
2024	560.159	212,10	11,993
2025	578.169	196,78	11,02

table 1. 1

(Data Kemiskinan dan Penduduk Miskin Kabupaten/Kota, t.t.)

Pemerintah Indonesia telah menjalankan beragam program bantuan sosial dan subsidi sebagai upaya pemenuhan hak dasar masyarakat, peringanan beban

hidup, serta peningkatan kualitas hidup kelompok kurang mampu. Bantuan-bantuan tersebut disalurkan secara langsung kepada individu, keluarga, maupun kelompok masyarakat kurang mampu melalui berbagai program, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Kendati demikian, pada kenyataannya angka kemiskinan belum memperlihatkan penurunan yang signifikan. Bahkan, kondisi tersebut cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Fenomena serupa juga terjadi di Kabupaten Indramayu, di mana tingkat kemiskinan mengalami fluktuasi naik turun dari waktu ke waktu. Kemiskinan di Kabupaten Indramayu sendiri didominasi oleh wilayah pedesaan, sehingga tidak mengherankan apabila sebagian besar masyarakat miskin di kawasan tersebut bermata pencaharian sebagai buruh bangunan, buruh pabrik, maupun petani (Sya'Diyah, t.t.).

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa zakat konsumtif memiliki pengaruh yang signifikan dan bersifat negatif terhadap angka kemiskinan di Kota Pekanbaru dan Dumai selama kurun waktu 2019-2023. Model terpilih menghasilkan nilai koefisien sebesar 226,1368 dengan tingkat probabilitas 0,5, yang menunjukkan bahwa peningkatan satu satuan pada penyaluran zakat konsumtif akan diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 226,1368. Sejalan dengan hal tersebut, zakat produktif juga terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kedua kota pada periode yang sama. Berdasarkan model terpilih, koefisien zakat produktif tercatat sebesar 14,19353 dengan probabilitas 0,0894, yang mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu

satuan dalam penyaluran zakat produktif akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 14,19353 (Rivaldo & Sidabalok, 2025).

B. Identifikasi Masalah

1. Efektifitas distribusi zakat

Bagaimana proporsi antara zakat produktif dan konsumtif ditentukan, apakah penyaluran lebih didominasi oleh zakat konsumtif dibandingkan dengan zakat produktif sehingga dampak jangka Panjang terhadap pengentasan kemiskinan menjadi minimum, dan sejauh mana data mustahik di indramayu terintegrasi dengan data kemiskinan daerah untuk menghindari tumpang tindih bantuan.

2. Dampak ekonomi terhadap mustahik

Bagaimana perubahan kesejahteraan setelah menerima bantuan, untuk keberlanjutan usaha apakah bantuan modal tersebut mampu meningkatkan pendapatan secara konsisten atau justru berhenti karena kurangnya pendampingan,

3. Kendala operasional dan manajerial baznas

Bagaimana masalah yang muncul dari sisi internal lembaga pengelolaan mengenai lemahnya pengawasan terhadap penggunaan zakat produktif oleh masyarakat di indramayu sehingga bantuan modal seringkali beralih fungsi menjadi kebutuhan konsumsi sehari-hari, dan keterbatasan jumlah personil baznas Kabupaten Indramayu dalam menjangkau wilayah geografis yang luas untuk memperbaiki pembinaan teknis kepada para pelaku usaha.

4. Faktor ekosistem lingkungan di Indramayu

Bagaimana masalah yang dipengaruhi oleh karakteristik local daerah tentang angka kemiskinan di beberapa kecamatan tertentu di Indramayu yang memerlukan pendekatan distribusi yang berbeda, dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi zakat produktif sehingga masyarakat cenderung lebih mengharapkan bantuan tunai langsung.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penyaluran zakat produktif dan konsumtif oleh BAZNAS Kabupaten Indramayu?
2. Bagaimana dampak program zakat produktif terhadap kondisi sosial ekonomi mustahik setelah menerima zakat produktif ?
3. Bagaimana dampak program zakat konsumtif terhadap kondisi sosial ekonomi mustahik setelah menerima zakat konsumtif?
4. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program zakat produktif dan konsumtif di Kabupaten Indramayu?

D. Tujuan penelitian

1. Mendeskripsikan bentuk dan mekanisme penyaluran zakat konsumtif dan produktif oleh BAZNAS Kabupaten Indramayu.
2. Mendeskripsikan kondisi sosial ekonomi mustahik setelah menerima zakat konsumtif dan produktif.
3. Mendeskripsikan dampak zakat konsumtif dan produktif terhadap kehidupan mustahik.

4. Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan zakat produktif dan konsumtif.

E. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur dalam konteks ekonomi islam, khususnya perbedaan antara zakat konsumtif dan produktif terhadap kesejahteraan mustahik.
- b. Menambah wawasan akademis tentang peran lembaga zakat seperti baznas dalam membangun ekonomi umat dan pengetasan kemiskinan berbasis prinsip syariah.
- c. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji efektivitas pengelolaan zakat dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat daerah.
- d. Memperkuat konsep integrasi zakat dalam sistem ekonomi islam sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan pemerataan kesejahteraan.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi BAZNAS Kabupaten Indramayu: Memberikan masukan untuk meningkatkan efektivitas program penyaluran zakat, baik konsumtif maupun produktif, agar tepat sasaran dan berkelanjutan.
- b. Bagi Pemerintah Daerah: Menjadi dasar pertimbangan dalam menyusun kebijakan pengentasan kemiskinan melalui sinergi antara lembaga zakat dan program sosial pemerintah.

- c. Bagi Mustahik (penerima zakat): Memberikan pemahaman tentang pentingnya optimalisasi dana zakat produktif untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi
- d. Bagi Masyarakat Dan Muztahik; Meningkatkan kepercayaan kepada lembaga pengelola zakat serta mendorong partisipasi aktif dalam menunaikan zakat demi kesejahteraan bersama.
- e. Bagi Akademisi Dan Praktisi Ekonomi Syariah: Menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran dalam merancang model distribusi zakat yang lebih efisiensi dan berdampak nyata bagi pengurangan kemiskinan.

